

SUMMARY

ANALISA YURIDIS OJEK ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Created by ANDI PRIYONO

Subject : YURIDIS, LALU LINTAS, ANGKUTAN

Subject Alt : JURIDICAL, TRAFFIC, TRANSPORT

Keyword : analisa yuridis;legalitas;ojek online

Description :

Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia menjadi salah satu faktor permasalahan dalam bidang transportasi, khususnya transportasi darat. Dalam hal ini, pemerintah diuntut untuk dapat memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi-solusi jitu untuk mengatasi keterbatasan sarana angkutan umum yang tersedia khususnya di Ibu kota Jakarta serta beberapa kota-kota besar lainnya. Namun, ketika pemerintah tidak dapat menyanggupi hal tersebut berakibat pada munculnya sarana angkutan yang bersifat alternatif, salah satunya adalah Ojek Online. Layanan Ojek Online hadir sebagai salah satu alternatif angkutan umum yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan keunggulan tersendiri mengingat Ojek Online bisa memberikan layanan door to door, mudah menjangkau lokasi sulit yang tidak dapat dilalui oleh angkutan umum. Akan tetapi, Ojek Online hanya merupakan sarana angkutan alternatif yang masih ilegal karena tidak diatur dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya pun tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam menangani fenomena Ojek Online agar tercipta kepastian hukum dan untuk itu pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan yakni dengan menegakan UULAJ yang ada atau dengan merevisinya agar Ojek Online menjadi legal. Disisi lain apabila pemerintah tidak tegas dalam menangani hal tersebut maka masyarakat sebagai pengguna Ojek Online akan terkena imbasnya dengan tidak terjaminnya perlindungan hukum yang akan menyulitkan penumpang untuk menuntut ganti kerugian apabila penumpang mengalami suatu kejadian yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian bagi penumpang, dari hal tersebut hanya ada satu Undang-Undang yang dapat digunakan penumpang untuk menuntut ganti kerugian kepada pengemudi ataupun perusahaan penyedia jasa Ojek Online yakni Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah terkait dengan beroperasinya Ojek Online, hal ini mengingat kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian terhadap Ojek Online ini dilakukan untuk menganalisa Ojek Online apabila di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang terfokus dalam mengkaji norma-norma dalam hukum.

Date Create : 25/05/2016

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201241027

Collection : 201241027

Call Number : 41-2016-S027

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation Collection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor